

DPR: Kebakaran Lapas Tangerang Tanggung Jawab Menkumham

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Syarifuddin Sudding meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bertanggung jawab penuh atas insiden kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, Rabu (8/9).

Menurutnya, kebakaran tersebut berkaitan dengan tanggung jawab Menkumham sebagai pengendali kebijakan pada lapas-lapas di seluruh Indonesia.

"Ada tragedi kemanusiaan dan saya kira ini sangat memprihatinkan kita semua. Jadi saya kira Yasonna harus bertanggung jawab dalam persoalan ini," kata Syarifuddin saat dihubungi wartawan, Kamis (9/9).

"Jangan lagi tanggung jawab seakan-akan dialihkan kepada Kalapas (Kepala Lapas) atau Dirjen Pemasyarakatan. Tapi, Yasonna sebagai pengendali kebijakan harus bertanggung jawab penuh terhadap tragedi kemanusiaan ini," ujarnya.

Menurutnya, kinerja Yasonna dalam menangani persoalan hukum dan HAM

di Indonesia tidak ada perbaikan, terutama soal situasi kondisi di lembaga pemasyarakatan. Ia pun menduga Yasonna hanya beretorika ketika rapat kerja bersama di Komisi III tentang perbaikan lapas, tetapi tidak ada implementasinya.

Syarifuddin menyoroti banyak masalah yang ada di hampir semua lapas di Indonesia saat ini. Masalah itu mulai dari isu overcapacity atau melebihi kapasitas, peredaran narkoba, hingga tak manusiawinya perlakuan petugas terhadap warga binaan.

Adanya kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, kata dia, menjadi salah satu di antara akumulasi persoalan yang ada di lapas. Persoalan-persoalan itu, juga sudah berulang kali disampaikan Komisi III kepada Menkumham.

"Karena memang hampir semua lapas di Indonesia itu mengalami kelebihan kapasitas, apalagi yang sangat tidak manusiawi. Di dalam, para sipir juga masih melakukan hal-hal yang bersifat diskriminatif dan sebagainya. Sangat kompleks masalah di lapas itu," ucapnya. ● han

Baleg Targetkan RUU PKS Rampung Sebelum Hari Ibu

JAKARTA (IM) - Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Willy Aditya menargetkan RUU PKS yang kini diberi judul RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) rampung sebelum Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember 2021 mendatang.

Willy yang merupakan wakil ketua Badan Legalisasi (Baleg) DPR itu menyatakan, penyelesaian RUU TPKS akan menjadi prioritas Baleg untuk segera dituntaskan.

"Pasti prioritas. Target selesai kalau bisa masa sidang ini. Kalau tidak, sebelum hari ibu-lah kita selesai," kata Willy dalam keterangan tertulis, Kamis (9/9).

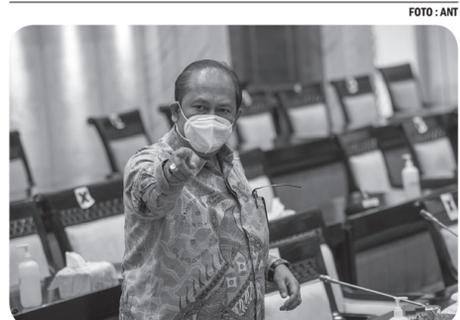
Willy menuturkan, tahapan pembahasan RUU TPKS ini sedang menunggu penyelesaian pemberian catatan dari fraksi-fraksi di DPR untuk kemudian dibahas dalam panja.

Ia pun memastikan tidak ada pengurangan substansi dari RUU PKS menjadi RUU TPKS. Menurutnya, Baleg

hanya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak tumpang tindih dengan undang-undang sejenis.

"Kita fokus biar tidak overlapping dengan UU satu dengan yang lainnya supaya lebih fokus ke korban. Prinsipnya apa yang sudah termaklumi di dalam UU KUHP dan lain-lainnya itu kita tidak bahas di RUU TPKS," katanya.

Willy memahami apabila ada dinamika pro dan kontra mengenai perubahan nama RUU PKS. Ia mengatakan, Baleg maupun panja terbuka untuk berdialog dengan seluruh elemen. Ia mengatakan, pihaknya juga siap melakukan kajian terhadap pandangan yang berbeda atau bertolak belakang agar ada titik temu sehingga RUU ini dapat disepakati. "Beberapa perubahan redaksi dan materi sebagai bagian dari dialektika yang terjadi agar pembahasan RUU ini terus mengalami kemajuan (progres), dengan begitu lahirnya payung hukum bagi ratusan ribu korban kekerasan seksual kian dekat untuk diwujudkan," kata Willy. ● mei



UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN ANGGOTA BPK

Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Blucer Welington Rajagukguk bersiap untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/9). Selain Blucer Rajagukguk, DPR juga menguji 15 calon anggota BPK lainnya dari berbagai latar belakang seperti tenaga ahli Ketua BPK, auditor utama BPK, ASN Kemenkeu hingga mantan anggota DPR.

Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Warga Ahmadiyah Tidak Dibenarkan

JAKARTA (IM) - Kementerian Agama (Kemenag) meminta masyarakat menaati Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, atau Anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Hal ini ditegaskan menyusul terjadinya perusakan tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Di mana ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9). Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi.

"Kalau surat edaran (SKB) ini ditaati bersama-sama, sesungguhnya tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan," kata Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin, Kamis (9/9).

"Kesungguhan kita kan

bagaimana surat edaran ini menjadi panduan bersama, kemudian ditaati bersama," katanya menambahkan.

Menurut Kamaruddin, saat ini banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman memadai terkait SKB tersebut. Oleh karena itu, pihaknya mengerahkan penyuluh agama dan bersinergi dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk menyosialisasikan SKB itu. "Ini yang terus kita lakukan," ujarnya.

Kamaruddin mengatakan, SKB yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung ini telah memberikan panduan jelas mengenai kedudukan Ahmadiyah di Indonesia. Pada intinya SKB tersebut memerintahkan JAI untuk menghentikan penyebaran penganut dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



ZIARAH TAMAN MAKAM PAHLAWAN DI SURABAYA

Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklat) Laksamana Madya TNI Nurhidayat (kanan) bersama Panglima Koarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto (kedua kiri) menabur bunga saat ziarah di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (9/9). Kegiatan ziarah serta tabur bunga itu merupakan rangkaian acara peringatan jelang HUT ke-76 TNI Angkatan Laut.

Jokowi Minta Pelajar Jangan Sampai Lepas Masker, Bila Perlu Pakai Rangkap

Bila ditemukan ada siswa yang tidak pakai masker, maka pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut dihentikan sementara dan kemudian dilakukan pembinaan terhadap guru-gurunya.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo mengingatkan para pelajar dan guru untuk mematuhi protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurut Jokowi, saat sudah belajar di sekolah, masker tidak boleh dilepas. Bahkan Kepala Negara menganjurkan pemakaian masker rangkap dua.

"Hati-hati, tetap protokol kesehatan. Harus dijaga ketat, terutama pakai masker. Jangan sampai dilepas," ujar Jokowi saat meninjau vaksinasi bagi pelajar dan santri di SMA Negeri 3 Wajo, Sulawesi Selatan, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/9).

Bahkan Kepala Negara menyarankan penggunaan masker secara double atau rangkap dua. Tujuannya untuk meminimalisasi potensi penularan Covid-19 saat beraktivitas.

"Saya pakai masker sampai double. Penting menjaga kita semuanya agar tidak menularkan dan tidak tertular oleh Covid-19," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengharapkan akan

semakin banyak siswa, murid, santri yang divaksinasi Covid-19 untuk mendukung proses pembelajaran tatap muka.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan (Kemkes) per 9 September 2021 pukul 12.00 WIB, ada 2.400.309 tenaga pendidik telah divaksinasi dosis pertama dan 2.000.322 sudah disuntik dosis kedua.

Kemudian, untuk remaja/pelajar usia 12-17 tahun terdapat 3.007.479 divaksin dosis pertama dan 2.030.928 dosis kedua.

Tak ada Toleransi

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah menegaskan, tidak ada toleransi bagi pelanggar protokol

kesehatan saat proses belajar tatap muka di sekolah.

"Perlu dipahami yang disorot (pelanggar proses) itu adalah kelas rendah (kelas 2 SD), ini hal yang manusiawi tapi kita tidak toleransi," kata Taga saat dihubungi melalui telepon, Selasa (7/9).

Sekolah yang melanggar protokol kesehatan kemudian diberikan sanksi belajar tatap muka dihentikan sementara dan dilakukan pembinaan. Sementara Pembinaan diberikan kepada guru sekolah untuk membimbing peserta didik tetap dalam protokol kesehatan saat proses belajar tatap muka berlangsung.

Taga juga menjelaskan bahwa sanksi penghentian sementara uji coba belajar tatap muka terbatas sudah tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 882 Tahun 2021.

"Sesuai Kepdisdik 882 kita hentikan dulu PTM (pembelajaran tatap muka) itu dan menjadi warning buat semua sekolah yang melaksanakan belajar tatap muka terbatas ini," ujarnya.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga disebut sudah melakukan monitoring secara

menyeluruh untuk memastikan seluruh sekolah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan asesmen dan pelatihan sebelum belajar tatap muka terbatas berlangsung. Mulai dari masuk gerbang sekolah para peserta didik diawasi seperti melakukan kewajiban mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh.

"Ini (pengawasan) upaya yang kita lakukan," ujarnya.

Sebagai informasi Disdik DKI Jakarta menajutahkan sanksi kepada SDN 05 Jagakarsa Jakarta Selatan lantaran saat proses belajar mengajar terlihat peserta didik kelas 2 menggunakan masker dipasang di dagu.

Sanksi yang diberikan yaitu pemberhentian proses uji coba belajar tatap muka terbatas selama sepekan dan memberikan pembinaan kepada guru dan tenaga pendidik agar siswa tak lagi melanggar protokol saat proses belajar berlangsung.

Belajar tatap muka terbatas di DKI Jakarta dimulai kembali pada Senin (30/8) pekan lalu diikuti oleh 610 sekolah yang sudah dilakukan asesmen sebelumnya untuk kesiapan protokol kesehatan. ● mar

SBY Ulah ke-72, AHY: Engkau Ajarkan Optimis dan Pantang Menyerah ...

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan ayahanda Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kerap dipanggil 'Pepo', selalu mengajarkan rasa optimis dan pantang menyerah dalam menghadapi situasi sulit. Hal itu disampaikan AHY di hari ulang tahun (HUT) ke-72 SBY.

"Dear pepo. Kami anak-anak dan cucu-cucu selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Bagi kami pepo adalah sosok suami, ayah, dan kakek panutan," ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Kamis (9/9) saat memberikan ucapan selamat ulang tahun (milad) untuk SBY dalam akun Instagram agusyudhoyono.

Menurutnya SBY adalah sosok role model, super mentor, guru bangsa, teman diskusi, pemimpin, dan sumber inspirasi kami semua dalam melangkah, menapaki hari-hari ke depan.

"Pepo darimu kami semua belajar untuk optimis. Dalam menggapai cita-cita tidak pernah menyerah. Berbuat kebaikan bagi semua," tambah Agus Harimurti Yudhoyono.

Dalam kesempatan itu, AHY bersama istri dan anaknya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-72 untuk SBY.

"Pepo tidak ada doa yang kami panjatkan selain berharap agar pepo tetap sehat dan selalu tersenyum bahagia. Karena kebahagiaan mu adalah ridho bagi kami semua. Selamat ulang tahun pepo With Love, AHY, Annisa, Aira," kata Agus Harimurti Yudhoyono.

Dalam postingan tersebut tampak cuplikan ucapan SBY dalam beberapa kesempatan perihal pembelajaran dalam menghadapi situasi sulit.

"Seberat dan sekeras apapun perjalanan hidup itu selalu ada jalan keluarnya. Bisa mengatasi kemudian menapaki jalan ke arah masa depan yang gemilang. Untuk mencapai masa depan gemilang seperti itu tidak ada jalan pintas dan tidak adapula resep yang ajaib. Kita mesti memiliki visi, pikiran cerdas, dan mau bekerja keras tanpa lelah," kata Susilo Bambang Yudhoyono dalam postingan video tersebut. ● mei

Penyidik KPK Periksa 4 Orang Saksi Terkait Kasus Korupsi Banjarnegara

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat orang sebagai saksi untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi terkait kegiatan pengadaan, pemborong, atau pun persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017 - 2018.

Keempatnya adalah Presiden Direktur PT Adi Wijaya, Hadi Suwarno; Direktur CV Puri Agung, Siti Rustanti; Direktur CV Karya Bhakti, Nursidi Budiono; dan Sopir PT Bumi Redjo sekaligus Direktur Utama PT Sutikno Tirta Kencana yakni Mistar.

Keempatnya diperiksa bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Budhi Sarwono (BS) dan Kedy Afandi (KA). Budhi merupakan Bupati Banjarnegara dan Kedy merupakan pihak swasta.

Pemeriksaan bakal dilakukan di Gedung Perwakilan BPKP DI Yogyakarta, Jl. Parangtritis KM 5,5, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Hari ini (Kamis, 9/9) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018 untuk tersangka BS dan KA," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021).

Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS), ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan pengadaan, pemborong, atau pun persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017 - 2018. Budhi ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan seorang pihak swasta, Kedy Afandi (KA).

Perkara ini berawal ketika Budhi memerintahkan pihak swasta sekaligus orang kerjanya, Kedy, untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara. Rapat koordinasi itu dilangsungkan di salah satu rumah makan.

Dalam pertemuan tersebut, Budhi memerintahkan dan mengarahkan Kedy untuk menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai 20% dari nilai proyek. Di mana, untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek.

Kemudian, pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara. Dalam pertemuan itu, Budhi menyampaikan secara langsung soal kenaikan

HPS senilai 20% dari harga saat itu. Adapun, nilai 20% itu dibagi menjadi 10% untuk Budhi, dan 10% sebagai komitmen fee.

Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelanggan pekerjaan infrastruktur, diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Dalam perjalanan proyek, Budhi kerap memantau Kedy untuk melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo. Adapun, penerimaan komitmen fee senilai 10% oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantara Kedy.

Diduga Budhi telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar.

Atas perbuatannya, Budhi Sarwono dan Kedy Afandi disangkakan melanggar 12 huruf (i) dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang tetang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ● han



UJI FORMIL UU CIPTA KERJA

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di gedung MK, Jakarta, Kamis (9/9). Sidang beragendakan mendengarkan keterangan ahli presiden sekaligus pakar hukum Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita dan sejumlah pakar hukum lainnya.

PENGUMUMAN
Dengan ini PT "TERRA NUSA MINERAL" berkedudukan di Jakarta Utara.
Bahwa terhitung sejak Februari 2021 telah dilakukan pengalihan 100% saham dalam PT "TERRA NUSA MINERAL", pengalihan tersebut telah ditegaskan kembali di bulan September 2021.
Bagi pihak yang berkeberatan atas pengalihan dan/atau penjualan tersebut harap menghubungi kepada Direksi Perseroan, selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari dari pengumuman ini tanggal 10 September 2021 karena pengalihan tersebut akan diberitahukan kepada Departemen Hukum.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Pasal 127 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENGUMUMAN PEMBUBARAN
Berdasarkan RUPS PT. KARTOO APUKASI INDONESIA (Perseroan) berkedudukan di Jakarta Selatan tanggal 20 Agustus 2021, pemegang saham Perseroan memutuskan untuk membubarkan Perseroan terhitung tanggal 20 Agustus 2021 dan menunjuk MOHAMMAD RIZKY ANIES selaku Likuidator. Bagi pihak yang berkeberatan atau memiliki tagihan dapat menghubungi Likuidator secara tertulis dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini disertai dokumen asli dan lengkap ke alamat Gedung Kemang 15 Lt. 3 JI. Kemang Raya No 15, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta, 10 September 2021
LIKUIDATOR

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT ASTEROS MITRA SOLUSI, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan saham dalam Perseroan yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan.
Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditor dan pihak-pihak yang akan mengajukan keberatan dengan maksud pengambilalihan saham-saham tersebut dalam waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:
Ruko Romy Max Blok D3 Nomor 31, Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 125, RT 017 RW 006 Jakarta, 12730
Jakarta, 10 September 2021
Direksi Perseroan